

ISSN : 2087 - 5576

JURNAL ILMIAH
HOSPITALITY MANAGEMENT
VOLUME 6 NO. 2 Januari - Juni 2016



DITERBITKAN OLEH:
SEKOLAH TINGGI PARIWISATA BALI INTERNASIONAL
DENPASAR

**REDAKSI JURNAL ILMIAH
HOSPITALITY MANAGEMENT**

Vol.6 No.2, Januari - Juni 2016

PENANGGUNG JAWAB:

Ketua STPBI
(Sekolah Tinggi Pariwisata Bali Internasional)
I Made Sudjana, SE., MM., CHT., CHA.

PIMPINAN REDAKSI:

Drs. I Wayan Pantiyasa, MM

**PENYUTING AHLI/
MITRA BESTARI:**

Prof. Azril Azahari, P.Hd.
(Sekolah Tinggi Pariwisata Bali Internasional)
Prof. Dr. I Nyoman Darma Putra, M.Litt.
(Universitas Udayana)
Dr. I Gusti Ketut Purnaya, SE., SH., M.Si.
(Sekolah Tinggi Pariwisata Bali Internasional)
Dr. Ir. Firi Abdilah, MM.
(Sekolah Tinggi Pariwisata Bali Internasional)
Dr. I Nyoman Sudiarta, SE., M.Par.
(Universitas Udayana)

PENYUTING PELAKSANA:

I Nengah Laba, S.Pd.,M.Hum.,CHT., CHE.
Agung Permana Budi, SE., MM.
Ni Made Ayu Sulasmini, S.Pd., M.Pd.,
CHT., CHE.

SEKRETARIAT DAN DISTRIBUSI:

I Made Trisna Semara, ST., M.Par
Made Robin
I Kadek Astawa



**SEKOLAH TINGGI PARIWISATA BALI
INTERNASIONAL**

ISSN: 2087 – 5576

DAFTAR ISI

KATA SAMBUATAN	iii
SEPATAH KATA DARI DEWAN REDAKSI	v
ANALISIS PENGELOLAAN DESA WISATA SEBAGAI PARIWISATA ALTERNATIF DI BALI Oleh I Wayan Pantiyasa dan I Nyoman Urbanus	65-74
IDEOLOGI YANG MEMENGARUHI PENGELOLAAN RESOR WISATA NUSA DUA, BALI Oleh I Gusti Ketut Purnaya dan Francisca Titing Koerniawaty	75-84
STRATEGI PEMASARAN JAKARTA SEBAGAI DESTINASI WISATA YANG SELARAS DENGAN PERSEPSI PENDUDUK LOKAL Oleh Budi	85-92
PENGARUH KOMPENSASI, KEPEMIMPINAN DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN DI SEKOLAH TINGGI PARIWISATA BALI INTERNASIONAL Oleh Ni Komang Nariani	93-100
PENGARUH KUALITAS LAYANAN AKADEMIK DAN HARGA (BIAYA PENDIDIKAN) TERHADAP WORD OF MOUTH MELALUI KEPUASAN MAHASISWA SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (STUDI PADA LPK SEKOLAH PERHOTELAN BALI) Oleh Nyoman Surya Wijaya, Syahnur Said dan Nengah Landra	101-114
THE CONCEPT OF TOURISM HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT BASED ON REGIONAL KNOWLEDGE IN THE INTERNATIONAL BALI TOURISM INSTIUTE Oleh I Wayan Eka Sudarmawan	115-124
THE EVALUATION OF PROMOTION STRATEGY OF MUSEUM BALI Oleh Narita Astika Yapto dan Francisca Titing Koerniawaty	125-132
PENGARUH PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TERHADAP KINERJA KARYAWAN DI INNA SINDHU BEACH HOTEL Oleh I Nyoman Sudiarta dan I Nyoman Surya Saputra.....	133-140
THE EFFECTIVENESS OF MARKETING STYLE BY SPA THERAPIST IN BOOSTING SALES TO AND LOCAL TOURISTS IN KUTA Oleh Komang Shanty Muni Parwati.....	141-146
PERSYARATAN PEMUATAN NASKAH PADA JURNAL “HOSPITALITY MANAGEMENT”	147-148

IDEOLOGI YANG MEMENGARUHI PENGELOLAAN RESOR WISATA NUSA DUA, BALI

I Gusti Ketut Purnaya dan Francisca Titing Koerniawaty

Sekolah Tinggi Pariwisata Bali Internasional

Surel : igkpurnaya@yahoo.co.id

koe.titing@gmail.com

ABSTRACT

Management of Nusa Dua Tourism Resort can not be separated from macro social and political developments at the national level and the micro at the regional level. The stakeholder power relations between the three pillars of the government (BTDC), investors, and the society in the management of Nusa Dua resort is influenced by external factors is the globalization that developing very fast. This study focused on analyzing and answering the basic of what ideology is affecting the management of Nusa Dua Tourism Resort. Results of this study indicate that the management of Nusa Dua Tourism Resort not only determined by the business management matters but also by the social and political situation and by global and others tourism related ideologies. Social and political change and demands by these ideologies force all three pillars in the Nusa Dua Tourism Resort management activities to wisely exercising their power in relation of each other for the benefit of all parties and assurance of the sustainability of the resort.

Keywords: Nusa Dua Tourism Resort, ideology, global, green, local wisdom

I. PENDAHULUAN

Perkembangan sosial politik makro di tingkat nasional dan mikro di tingkat daerah, menjadi perhatian bagi tiga pilar pengampu kepentingan antara pemerintah, investor, dan masyarakat dalam pengelolaan Resor Wisata Nusa Dua juga dipengaruhi faktor eksternal yaitu globalisasi yang sangat pesat perkembangannya. Hal ini terjadi bukan saja karena resor wisata Nusa Dua merupakan bagian dari institusi *hospitality* global tetapi juga karena sejak awal direncanakan, Resor Wisata Nusa Dua memang dimaksudkan menjadi destinasi wisata kelas dunia, bersifat mewah (*luxurious*), dan bertaraf internasional. Kehadirannya tidak saja dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akomodasi wisatawan yang berkunjung ke Bali, meningkatkan roda perekonomian regional, meningkatkan pendapatan devisa negara lewat celah baru di bidang kepariwisataan, tetapi juga untuk menunjukkan kepada dunia luar bahwa Indonesia memiliki dan mampu mengelola resor kelas mewah di dunia yang memenuhi kaidah-kaidah universal seperti pelestarian lingkungan, berorientasi pada budaya lokal, hemat energi, aman, berkelanjutan, dan pariwisata hijau (*green tourism*) yaitu pariwisata yang memperhatikan pelestarian lingkungan.

Ideologi merupakan kata yang sangat kompleks dan telah dirumuskan dengan berbagai cara. Secara sederhana, ideologi sebetulnya merupakan ilmu tentang ide, atau alat analisis dalam

ilmu sosial untuk mengetahui apa itu ide dan apa yang dimaksud dengan ide yang ideal (Macey 2001: 198). Ideologi juga merupakan konsep yang diangkat dari dan dipakai menutupi realitas sosial untuk melegitimasi dominasi kelas dengan membuat ideologi itu seakan tampak alamiah dan *ahistory* (Macey 2001: 198-199), dalam arti seolah-olah tidak berkaitan dengan kepentingan sosial politik. Berdasarkan definisi ini, seorang pemikir Marxist yang sering diasosiasikan dengan konsep ideologi, Louis Althusser berpendapat bahwa ideologi sesungguhnya adalah mekanisme dengan cara apa kelompok elit memaksakan kepentingan-kepentingan (*interests*) dan keyakinan-keyakinannya (*beliefs*) terhadap massa dalam sebuah masyarakat (Lewis 2008: 398).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ideologi apa yang memengaruhi relasi kuasa dalam pengelolaan resor wisata nusa dua. Manfaat teoretis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman teoretis atas ideologi yang memengaruhi tiga pilar pengampu kekuasaan dalam pengelolaan Resor Wisata Nusa Dua (pemerintah, investor, dan masyarakat lokal). Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat teoretis dalam pengembangan dan pengelolaan resor wisata, khususnya usaha-usaha dalam memahami secara konseptual hubungan antara pemerintah, investor, dan masyarakat lokal di Resor Wisata Nusa Dua. Apa yang tampak sederhana dalam pandangan

awam atau di permukaan, jika ditelusuri secara kritis dengan kaca mata kajian budaya, dapat memberikan pemahaman baru tentang pola-pola yang menjadi bagian dalam memberikan pengaruh pada pengembangan dan pengelolaan Resor Wisata Nusa Dua. Manfaat praktis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengambil kebijakan, memberikan ide-ide yang dapat digunakan untuk mengembangkan industri pariwisata di Bali atau di Indonesia terutama dalam kaitannya dengan pengembangan resor wisata, dan diharapkan memberikan kesadaran kritis bagi masyarakat, agar masyarakat dapat turut memberikan kontribusi dalam pembangunan pariwisata di lingkungan Resor Wisata Nusa Dua.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam mengkaji permasalahan sesuai dengan topik penelitian ini dalam perspektif Kajian Budaya menggunakan teori diskursus kuasa/ pengetahuan dari Michel Foucault dan teori tindakan komunikatif dari Jürgen Habermas yang penggunaannya dilakukan secara eklektik.

A. Teori Diskursus Kuasa/ Pengetahuan

Teori diskursus yang diacu dalam penelitian ini adalah teori diskursus yang mengetengahkan relasi antara kekuasaan dan pengetahuan dari Michel Foucault (1926-1984). Teori diskursus pernah diperkenalkan oleh orientalis Edward W. Said meskipun nyata bahwa baru menjadi populer setelah diperkenalkan oleh Foucault. Said menunjukkan bagaimana wacana Barat tentang Timur (orientalisme) bisa dijadikan contoh suatu konstruk “pengetahuan” tentang Timur yang diciptakan oleh Barat dan suatu bentuk hubungan antara “kekuasaan-pengetahuan” yang mengartikulasikan kepentingan “kekuasaan” Barat (Storey 2003: 135). Said bahkan mengutip pernyataan Michel Foucault bahwa “kebenaran” suatu wacana tergantung pada apa yang dikatakan, terutama siapa yang menyatakan, kapan dan di mana ia menyatakannya; kebenaran suatu wacana tergantung pada konteks, yakni konteks kekuasaan.

Michel Foucault sebagai tokoh teori diskursus kuasa/pengetahuan mendapat inspirasi dari pemikiran Nietzsche tentang “Kematian Tuhan”. Pemikiran Nietzsche (1844-1900) ini membuka kesempatan luas bagi pemikir untuk menentukan dirinya, yang akhirnya bermuara pada sikap “nihilism”, suatu sikap yang menentang aturan moralitas yang wajib berlaku untuk semua orang. Nietzsche menganjurkan moralitas yang mencintai manusia, di mana moralitas dapat dibenarkan hanya bila mendukung keunggulan dan mengangkat derajat manusia.

Semua nilai kehidupan harus dievaluasi kembali, sehingga lahir manusia unggul yang bebas dari kekuasaan lain. Pemikiran ini berhasil mendobrak kemapanan dan kebenaran kekuasaan tokoh-tokoh agama dan kebudayaan Eropa, sehingga Paul Ricoeur menyebut pemikiran Nietzsche sebagai “post-religieuse”, sebagai jembatan yang menghubungkan agama dengan iman yang baru (Sudiarja, 1982: 3-9).

Pemikiran Nietzsche tersebut diadopsi oleh Foucault untuk meramalkan “kematian manusia” dalam ilmu-ilmu sosial kemanusiaan. “Kematian Manusia” atau Kematian Subjek” dapat ditafsirkan sebagai berakhirnya konsep tertentu tentang manusia, misalnya konsep tradisi humanism modern tentang manusia. Pada masa modern, konsep diri (self) adalah sesuatu yang otonom yang dihadapkan dengan dunia sebagai objek-objek yang dapat diketahui oleh rasionya dan tidak terpengaruh oleh konteks sosial-historis. Foucault menolak pandangan Descartes dan Kant tentang rasio dan kodrat yang tidak terpengaruh oleh konteks sosial-historis (Lubis, 2004: 184).

Michel Foucault melihat kehendak untuk menemukan kebenaran objektif-universal sebagai bentuk dari kehendak pada kekuasaan. Senantiasa ada keterkaitan antara kebenaran dengan permainan kuasa. Wacana sebagai “dasar untuk memutuskan apa yang akan ditetapkan sebagai suatu fakta dalam masalah-masalah yang dibahas dan untuk menentukan cara paling sesuai untuk memahami fakta-fakta yang kemudian ditetapkan”. Kajian diskursus ini menurut Foucault disebut “arkeologi” bukan sejarah, sebagai kumpulan peristiwa yang diucapkan, disusun, diulang, dimanfaatkan kembali, ditransformasikan di dalam kebudayaan.

Berbeda dengan paradigma modernitas, subjek dan wacana berada dalam kualitas interdependensi. Subjek berada dalam posisi sosial wacana, subjek sebagai agen sosial. Sebaliknya wacana pun memerlukan kehadiran subjek dalam rangka penyebarluasannya. Dalam hubungan ini baik wacana maupun subjek bebas dari dominasi narasi-narasi besar. Wacana memiliki relevansi dalam seluruh kehidupan manusia baik kehidupan praktis sehari-hari, maupun kehidupan formal misalnya dalam tradisi ilmu pengetahuan. Wacana merupakan pusat aktivitas tetapi tidak bersifat universal (Ratna, 2006: 280).

Michel Foucault tidak memusatkan perhatian pada pencarian asal-usul sebagaimana dipahami dalam tradisi intelektual konvensional, tetapi lebih kepada hubungan kekuasaan yang ada di balik gejala yang menjadi objeknya, sehingga konsekuensi logis yang ditimbulkan adalah penemuan pada wacana marginal, bukan pusat. Kekuasaan bukan mekanisme,

melainkan produktif yang memicu munculnya objek-objek pengetahuan yang baru sehingga kekuasaan dan pengetahuan tidak bisa dipisahkan.

Menurut Michel Foucault, ketika sebuah wacana atau diskursus dilahirkan, maka diskursus itu sesungguhnya telah dikontrol, diseleksi, diorganisasi, dan didistribusikan kembali menurut kemauan pembuatnya. Wacana itu juga dikonstruksi berdasarkan aturan-aturan (episteme) tertentu sehingga kebenaran memiliki mata rantai dengan sistem kekuasaan. Ia menempatkan kebenaran, rasio, pengetahuan, ilmu, diskursus akademik, pengobatan, pendidikan, rumah sakit, manusia dan sebagainya dalam rangka relasi dengan kekuasaan. Kekuasaan adalah relasi-relasi yang bekerja dalam ruang dan waktu tertentu serta memproduksi kebenaran. Kebenaran memiliki mata rantai dengan sistem kekuasaan. Kebenaran tidak berada di luar kekuasaan, akan tetapi berada dalam kekuasaan itu. Kekuasaan adalah kebenaran (Lubis, 2004: 150 dan 163).

Foucault memahami ilmu pengetahuan sosial dapat menjadi alat penguasaan manusia atas manusia, artinya untuk mengendalikan dan memengaruhi putusan (tubuh dan jiwa) orang lain, sehingga terjadilah dwitunggal kekuasaan-pengetahuan. Tubuh dilihat sebagai "mesin hidup" (man-the-machine) sebagai sumberdaya dan tenaga kerja yang perlu dikendalikan dan dimanfaatkan guna kemajuan. Agger (2006: 349) menilai posmodernisme Foucault menawarkan pandangan berharga tentang kontrol sosial. Para sosiolog sangat terbantu dalam melihat perilaku menyimpang dalam hal pengalaman dan makna yang mengkonstruksinya.

Tilaar (2003: 81) menyebut pandangan Foucault sangat sesuai dengan abad informasi dewasa ini yang menganggap bahwa pengetahuan dan kekuasaan mempunyai dasar yang sama. Kekuasaan menciptakan pengetahuan, dan pengetahuan serta kekuasaan saling memengaruhi secara langsung satu sama lain. Dengan demikian, ideologi yang diterapkan penguasa merupakan peta-peta makna yang meski berpotensi mengandung kebenaran universal, sebenarnya merupakan pemahaman historis yang menopengi dan melanggengkan kekuasaan (Barker, 2004: 13).

Teori diskursus kuasa/pengetahuan dalam penelitian ini digunakan untuk mengkaji ideologi yang memengaruhi relasi kuasa dalam pengelolaan Resor Wisata Nusa Dua.

B. Teori Tindakan Komunikatif

Habermas mengemukakan teori tindakan komunikatif dengan tekanan pada kesadaran subjek dan kompetensi komunikatif, yang jelas-jelas akan membawa mainstream (arus utama) kajian pada

berfungsinya kapasitas kognitif manusia yang berperan sebagai subjek. Satu versi teori kritis Habermas yang melewati batas teori-teori lain dari Mashab Frankfurt awal, yang belum membedakan kerangka filsafat Yunani, idealisme Jerman dan bahkan konsep Marx tentang hubungan subjek (orang) dengan objek (orang lain dan alam) (Agger, 2006: 189). Habermas mengemukakan perubahan dari "paradigma kesadaran", yang menyetujui dualitas barat atas subjek dan objek ke "paradigma komunikasi". Paradigma komunikasi ini mengkonseptualisasikan pengetahuan dan praktek sosial bukan dalam hal dualitas antara subjek dan objek, namun melalui rekonseptualisasi subjek sebagai intersubjektif yang inheren. Subjek intersubjektif ini memiliki kapasitas primer bagi komunikasi, bukan hanya kapasitas kerja.

Teori Tindakan Komunikatif yang dikemukakan oleh Habermas, secara komprehensif telah memperkenalkan eklektisisme aplikasi teori-teori sosial yang harus bisa menangkap dan membedah permasalahan secara kritis, reflektif, grounded dan emansipatoris. Berangkat dari teori kritis, Habermas menyadari masih tersisanya ruang dan fenomena yang belum bisa diselesaikan oleh teori kritis. Fenomena modernitas yang dilihat secara emik belum bisa dimengerti dan diikuti oleh masyarakat dan individu-individu yang diharapkan mampu sebagai subjek di dalamnya, sehingga dikatakan modernisasi belum selesai. Dalam usaha perjuangan emansipatoris, Habermas mengkonstruksi ulang teori Tindakan, Fenomenologi, dan Hermeneutika, menjadi Teori Tindakan Komunikatif. Teori kritis baik sebagai teori maupun sebagai filsafat dan mainstream studi kognitif dan kesadaran, dilibatkan di dalamnya, dengan menilik kembali "rasionalitas" yang banyak menuai kritikan, terlebih lagi penolakan Lyotard (Lubis, 2004: 221) terhadap "rasionalitas universal" yang justru menutup pemikiran kritis, bahkan disensus dan ketidaksepakatan radikal yang tidak bisa dipungkiri adanya. Dengan Teori Tindakan Komunikatif atau The Theory of Communicative Action, Habermas menekankan kembali "rasionalitas komunikatif" dan "kompetensi komunikatif" (Lubis, 2004).

Teori Tindakan Komunikatif sebagai rekonstruksi dan sintesis dari Fenomenologi, Teori Komunikasi, Teori Tindakan dan Hermeneutika mensyaratkan eklektisisme dan emansipasi perjuangan intelektual bagi subjek-subjek yang terpinggirkan, tertindas dan tak berdaya tanpa kompetensi komunikasi. Posisi subjek harus lebih mendapatkan perhatian dalam masalah kapitalisme akhir, dimana menurut Habermas (Agger, 2003), sistem menjajah dunia kehidupan berjalan

sedemikian rupa sehingga orang terhambat untuk mengembangkan makna budaya bersama komunitas berdasarkan pengalaman hidup sehari-hari dan bahasa. Upaya perjuangan membangun kapasitas komunikatif masyarakat untuk mengikuti dan menggelar diskusi nasional yang merupakan demokrasi. Upaya-upaya ini dapat muncul sebagai satu gerakan sosial baru, termasuk environmentalisme, feminisme dan pasca kolonialisme berdasarkan prinsip etis komunikasi rasional yang tidak terdistorsi untuk membangun 'subjek kolektif' transformatif.

Teori Tindakan Komunikatif dalam penelitian ini digunakan untuk mengkaji pemaknaan relasi kuasa dalam pengelolaan Resor Wisata Nusa Dua. Kajian akan dilaksanakan dengan mencari dan mengkontraskan kata-kata kunci yang dipakai oleh tiap-tiap pilar (pemerintah, pengusaha, dan masyarakat) dalam mengutamakan keinginan masing-masing. Teori ini digunakan untuk menganalisis bagaimana wacana (pilihan kata, cara-cara penyampaian) yang digunakan tiap-tiap pilar dalam memperkuat posisi tawarnya atau dalam berinteraksi. Selain melalui wawancara, wacana itu akan digali melalui kliping koran pemberitaan tentang Resor Wisata Nusa Dua yang relevan dengan topik relasi kuasa.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dirancang sebagai penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Penelitian ini bukan sekedar tindakan, ucapan manusia tetapi juga teks dan konteks yang ada di masyarakat.

Lokasi obyek penelitian dilakukan di Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, yang meliputi tiga desa adat, yakni desa adat Bualu, desa adat Peminge, dan desa adat Kampial. Secara geografis Resor Wisata Nusa Dua adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Kelurahan Benoa yang telah menjadi sorotan dunia sebagai salah satu resor wisata terbaik di dunia. Sumber data melalui berbagai sumber, berupa data primer yakni pemerintah, investor, dan masyarakat. Sumber data sekunder diambil dari catatan, hasil observasi, jurnal ilmiah, dokumen, dan lain-lain. Sumber informasi adalah mereka yang mengetahui atau terlibat dalam relasi tiga pilar, atau siapapun yang dianggap tahu dan memiliki pengetahuan dianggap informan.

Untuk memperoleh data yang relevan, beberapa teknik pengumpulan data diterapkan antara lain teknik pengamatan, teknik wawancara, dokumentasi, dan perpustakaan. Analisis data dibagi dalam empat tahap (Sugiyono, 2005: 101), yakni

analisis domain, analisis taksonomi, analisis komponensial, dan analisis tema kultural.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ada tiga ideologi dominan yang memengaruhi dalam pengelolaan Resor Wisata Nusa Dua. Ketiga ideologi itu adalah ideologi pariwisata global, ideologi pariwisata hijau, dan ideologi pariwisata budaya berbasis kearifan lokal yaitu Tri Hita Karana.

Ideologi pariwisata global adalah mekanisme global di bidang pariwisata yang diperkenalkan, dikenakan, dan 'dipaksakan' oleh kelompok tertentu dengan argumen untuk menyukseskan bisnis jasa pariwisata. Dalam situasi demikian, masyarakat pariwisata atau pengelola resor wisata di seluruh dunia mau tidak mau harus mengikuti ideologi pariwisata global jika ingin bertahan atau memenangi kompetisi. Salah satu contoh ideologi pariwisata global adalah pentingnya keamanan dalam pelayanan jasa pariwisata. Sejak kasus terorisme menjadikan wisatawan sebagai target, maka ada kesadaran baru di kalangan dunia kepariwisataan untuk memastikan bahwa properti mereka dijaga keamanannya (*safety and security*) dengan optimal. Sebagai salah satu resor wisata berkelas internasional, Nusa Dua pun mau tidak mau harus menunjukkan akuntabilitas dan prosedur operasi yang standar dalam penjagaan keamanan, kalau tidak wisatawan atau *customers* akan ragu untuk memilih Nusa Dua untuk tempat berlibur atau aktivitas konvensional yang mereka rencanakan.

Selain ideologi pariwisata global, pengelolaan Resor Wisata Nusa Dua juga tunduk pada ideologi pariwisata hijau (*green tourism*), yaitu suatu mekanisme yang sudah diterapkan di Nusa Dua untuk meningkatkan citra dan kualitas resor khususnya dalam konteks pelestarian lingkungan. Ideologi pariwisata hijau boleh dikatakan bagian dari ideologi pariwisata global, tetapi karena spesifik sifatnya maka di sini akan diuraikan secara tersendiri sebagai salah satu ideologi yang ikut memengaruhi pengelolaan Resor Wisata Nusa Dua. Ideologi lain yang juga penting dibahas sebagai hal yang ikut memengaruhi pengelolaan Resor Wisata Nusa Dua adalah ideologi pariwisata budaya berbasis kearifan lokal Bali, dalam hal ini Tri Hita Karana (THK). Yang terakhir ini dianggap ikut memengaruhi pihak pengelola/ BTDC dan beberapa hotel di resor wisata Nusa Dua membuka diri dan mengikuti akreditasi untuk THK Award sebagai bentuk apresiasi mereka pada kearifan lokal dan mendukung ideologi pariwisata budaya. Fakta menunjukkan bahwa ideologi pariwisata budaya lewat THK Award ini oleh pihak BTDC dan hotel-hotel dirasakan

bermanfaat dalam berpromosi dan pemasaran (*promotion, sales and marketing*).

A. Ideologi Pariwisata Global

Pembangunan Resort Wisata di Nusa Dua sejak awal dimaksudkan sebagai destinasi wisata mewah berkelas internasional. Sejak perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, dan pengeloannya, Resor Wisata Nusa Dua melibatkan berbagai lembaga atau instansi global, mulai dari konsultan perencana Perancis dan Jepang, pendanaan Bank Dunia dan Asian Development Bank (ADB), dan *international chain hotels* seperti Club Med, Sheraton, Westin, Hyatt, Sol Hotel, dan Hilton yang mengelola hotel-hotel di sana. Belakangan, Hilton mundur dari mengelola sebuah hotel di resor wisata Nusa Dua, diganti dengan manajemen nasional yaitu Ayodya. Hotel-hotel baru bermunculan di Resor Wisata Nusa Dua, baik yang dikelola manajemen hotel internasional maupun nasional, yang jelas resornya secara keseluruhan beroperasi di bawah ideologi pariwisata global. Walaupun Nusa Dua adalah resor yang secara geografis terletak di wilayah desa di ujung selatan Pulau Bali merupakan sebuah *global space*. Kehadiran Resor Wisata Nusa Dua berada dalam jaringan pariwisata internasional dan berintegrasi dengan sektor lain seperti ekonomi, transportasi, dan finansial. Yang dimaksud dengan ideologi pariwisata global adalah gagasan yang melihat industri pariwisata dan segala aktivitasnya sebagai bagian yang terintegrasi secara global. Larry Dwyer (dalam William F. Theobald ed., 2005) menegaskan bahwa:

Because tourism is essentially integrated with other sectors in the economy, global tourism trends cannot be considered in isolation from key drivers that will shape the world of the future. Key drivers can be grouped under four headings: the global economy and globalization, natural resources and environment, science and technology, and demographics (2005: 529).

Dalam pernyataan di atas jelas diungkapkan bahwa kepariwisataan adalah usaha yang sangat kompleks, kait mengait, dan terintegrasi dengan berbagai sektor dan tidak bisa dilihat sebagai usaha yang terisolasi. Sehubungan dengan itu, menurut Dwyer, ada empat kelompok kunci yang menjadi penentu masa depan pariwisata global, yaitu global ekonomi dan globalisasi (*the global economy and globalization*), sumber daya alam dan lingkungan (*natural resources and environment*), ilmu pengetahuan dan teknologi (*science and technology*), dan kependudukan (*demographics*).

Keempat kelompok kunci ini berlaku untuk pengelolaan masa depan Resor Wisata Nusa Dua, hanya saja perlu ditambahkan setidaknya dua hal yang berdimensi global yaitu arti penting keamanan (*safety and security*) dan sumber daya budaya. Dwyer memasukkan sumber daya alam dan lingkungan, tentu wajar dilengkapi dengan sumber daya budaya yang berkaitan dengan seni, tradisi, budaya dan kearifan lokal.

Dalam pengelolaan Resor Wisata Nusa Dua, semua unsur di atas menjadi wacana penting dan merupakan ideologi untuk mewujudkan keamanan dan kenyamanan Resor Wisata Nusa Dua. Menurut Foucault, kekuasaan tidak mesti hadir dengan kekerasan tetapi bisa juga hadir lewat regulasi (Brtns, 2014:312-313), dan dengan regulasi seperti itu, penguasa atau pengusaha bisa melakukan normalisasi untuk melanggengkan kekuasaan dan kepentingannya.

Resor Wisata Nusa Dua merupakan resor wisata yang bertaraf internasional, bukan saja dari segi daerahnya tetapi hotel yang ada di Resor Wisata Nusa Dua sudah bertaraf internasional. Selain kemewahan dan keindahan, yang juga penting untuk membangun citra destinasi adalah keamanan (*security*). Untuk masuk Resor Wisata Nusa Dua para wisatawan asing maupun wisatawan lokal yang hanya sekedar berkunjung atau *sightseeing* ke resor wisata Nusa Dua harus melewati pos keamanan untuk diperiksa oleh petugas keamanan (*security*). Pemeriksaan ini berlaku untuk setiap orang atau kendaraan yang masuk, tidak terkecuali kendaraan dinas pelat merah milik pemerintah atau mobil *crew* televisi yang sudah ada logonya didinding atau kaca luar mobil. Kemajuan teknologi pemantauan menampilkan teknik baru untuk mengawasi dan menjaga keamanan resor wisata Nusa Dua. Tidak hanya sebatas pemeriksaan keamanan saja tetapi di sekitar wilayah Resor Wisata Nusa Dua di beberapa titik dipasang kamera CCTV untuk memantau keamanan wilayah wisata Nusa Dua. Hal ini tanpa disadari oleh wisatawan yang berkunjung ke Resor Wisata Nusa Dua.

Keamanan mendapat pengutamaan lebih dari yang sudah-sudah. Ideologi pariwisata global mengenai keamanan diterima dengan baik karena adanya kebutuhan akan keamanan, agar kejadian masa lalu tidak terulang lagi. Pengamanan di Nusa Dua diarahkan pada pemenuhan standar yang global, sebagaimana tercantum dalam laporan tahunan BTDC (2010: 24) sebagai berikut:

...menyadari pentingnya keamanan dan kenyamanan bagi para wisatawan, perseroan membangun sistem teknologi yang efektif di bidang pengamanan. Sistem tersebut

diharapkan mampu memenuhi harapan para wisatawan yang sangat tinggi di bidang keamanan.

Resor Wisata Nusa Dua sudah terbukti memiliki sistem penjagaan keamanan yang baik, hasil kerja sama dengan berbagai pihak yang berkepentingan. Sudah beberapa kali Nusa Dua menjadi tuan rumah pertemuan internasional yang membutuhkan sistem penjagaan keamanan kelas dunia, dan sudah sekian kali pula pelaksanaan event itu sukses tanpa gangguan keamanan sama sekali, seperti halnya pertemuan puncak pemimpin APEC 2013 dan Miss World 2013 di Nusa Dua. Wacana keamanan global mendapat dukungan dari berbagai pihak. Masyarakat lokal pun, yang tinggal dan merupakan penduduk asli setempat, harus rela mematuhi standar keamanan, mungkin sedikit terganggu kenyamanannya, bila harus pergi ke areal resor wisata Nusa Dua. Atas pengertian akan dan pengaruh atas ideologi pariwisata global dan keamanan optimal, mereka mematuhi ketentuan yang ada.

B. Ideologi Pariwisata Hijau

Ideologi pariwisata hijau dalam pengelolaan Resor Wisata Nusa Duamerupakan sebuah ideologi relasi kekuasaan global yang berorientasi pada pelestarian lingkungan dan pembangunan pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism*). Pihak BTDC bekerja sama dengan pengusaha melakukan pengelolaan lingkungan dan mengajukan diri untuk proses sertifikasi dan akreditasi internasional seperti *Green Globe/Earth Check* dan *Tri Hita Karana Tourism Award and Accreditation*. Melalui komitmen mengikuti sistem penilaian internasional itu, pengelolaan Resor Wisata Nusa Duamemastikan diri untuk memenuhi standar dunia internasional dalam pengelolaan resor wisata berbasis pariwisata hijau.

Prinsip pariwisata hijau mempunyai standar, yaitu standar kriteria *Green Globe/Earth Check*, standar ini sampai sekarang masih tetap menjadi acuan dalam pengelolaan dan pengaturan kinerja lingkungan Resor Wisata Nusa Duadan sekitarnya, yang antara lain memuat kebijakan sosial dan lingkungan berkelanjutan. Dengan adanya komitmen ini dalam mengelola Resor Wisata Nusa Duadengan prinsip-prinsip lingkungan berkelanjutan, maka BTDC menetapkan kebijakan lingkungan di resor yang mengadopsi beberapa standar yang ditentukan secara internasional. Sertifikat *Earth Check* diberikan kepada industri atau perusahaan untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan, pengurangan energi, penyedotan air tanah secara berlebihan, penggunaan lahan untuk pembangunan yang tanpa adanya resor

hijau, pengurangan pantai, serta pengeksploitasian alam secara berlebihan, dan untuk mengontrol pembuangan limbah padat dan cair dari industri secara berlebihan dan memberikan pengalaman kepada tamu hotel, memaksimalkan dan meminimalkan dampak lingkungan dan sosial yang terjadi.

Salah satu cara yang dilakukan dalam pariwisata hijau, pengelola Resor Wisata Nusa Duakhususnya BTDC menciptakan iklim mikro yang nyaman bagi wisatawan, maka BTDC menjaga *common area* yang luasnya ± 30 ha (10% dari luas resor) untuk dijadikan areal hijau. Keberadaan areal hijau yang tersebar di seluruh resor ini telah ditanami dengan berbagai jenis tanaman dengan total 6080 batang, termasuk di dalamnya pelestarian tanaman langka yang ditanam sebanyak 2899 batang.

Untuk penerapan konsep pengembangan taman di Resor Wisata Nusa Dua mangadaptasi konsep lokal Panca Warna dalam desain *landscape* resor. Dalam desain taman yang berbeda warna, dengan penanaman pohon di sebelah Utara yang didominasi warna Gelap, sebelah Timur didominasi warna Putih, di sebelah selatan didominasi warna Merah, di sebelah *Barat* didominasi warna Kuning, dan di tengah didominasi kombinasi semua macam warna. Dengan mengedepankan konsep konservasi bagi flora lokal, yaitu dengan tetap menjaga beberapa lokasi konservasi untuk penanaman flora lokal seperti payung, intaran, camplung, waru, badung, pule, piling di seluruh *common area*, yang jumlahnya diusahakan tetap meningkat setiap tahun sejalan dengan instruksi BUMN penanaman 1 juta pohon.

Mengantisipasi pencemaran BTDC sebagaimana ketentuan pariwisata hijau dan sertifikat *Earth Check* BTDC sebagai pengelola Resor Wisata Nusa Duamempunyai lagoon. Lagoon adalah lokasi pengolahan air limbah terpadu yang dioperasikan untuk mengolah air buangan dari seluruh Hotel dan fasilitas lainnya di Resor Wisata Nusa Dua dan sekitarnya untuk selanjutnya dimanfaatkan kembali menjadi air irigasi penyiraman taman di resor BTDC. Lagoon yang ada di BTDC dipisahkan menjadi 2 sistem pengolahan yaitu: sistem pengolahan air limbah (sistem waste stabilization pond/kolam stabilisasi limbah) dan sistem pengolahan air irigasi (aerasi, sedimentasi, dan filtrasi). Semua ini merupakan standar yang harus dimiliki di Resor Wisata Nusa Dua, sehingga dapat memperoleh sertifikat *Earth Check*.

Program *Earth Check* merupakan sistem manajemen standarisasi dan sertifikasi terbesar dalam program ramah lingkungan di bidang industri perjalanan dan pariwisata. Program *earth check* dikembangkan oleh *Sustainable Tourism*

Cooperative Research Centre (STCRC) melalui pendanaan dari pemerintah Australia. Saat ini terdapat banyak organisasi yang menyuarakan tentang penghijauan dan perusahaan yang ramah akan lingkungan. Tetapi, dari sekian banyak organisasi tersebut tidak berapa yang berani di audit oleh pihak ketiga. Dalam hal ini *Earth Check* dengan berani dan terbuka akan memberikan perusahaan-perusahaan apa saja yang baik untuk diajak bekerja sama. Tentunya perusahaan yang baik dan mempunyai standarisasi tentang lingkungan. Program pemberian sertifikat berupa *Earth Check* ini dimulai pada tahun 1987 dan berlanjut sampai sekarang.

Agar bisa mendapatkan *Earth Check*, persyaratan yang diikuti oleh perusahaan atau hotel di Resor Wisata Nusa Duaini merupakan salah satu dari bentuk mekanisme dari kekuasaan, sebagaimana Foucault menyatakan bahwa kekuasaan itu bukan milik, melainkan sebuah strategi. Apabila semua dilakukan berarti kekuasaan itu berjalan dengan baik.

Earth Check mempunyai tipe-tipe dan mempunyai panduan tersendiri untuk proses mendapatkan sertifikat. Untuk pengelola Resor Wisata Nusa Dua khususnya BTDC juga mengikuti *Earth Check*, tetapi *Earth Check* yang diikuti mempunyai nama yang beda yaitu *Earth Check Community*. Perbedaan ini karena BTDC merupakan BUMN yang bertugas mengembangkan dan mengelola resor wisata sebagai bentuk representasi pemerintah dan masyarakat demi keuntungan dan keberlanjutan lingkungan, ekonomi dan budaya. Proses yang ditempuh untuk mendapatkan *Earth Check* ini. *Earth Check Certified Community* yang diberikan ke BTDC berbeda pada tahapan *benchmarking* dan sertifikatnya dibandingkan dengan perusahaan dan hotel lain yang mempraktikkan manajemen lingkungan,

Ideologi pariwisata hijau dalam pengelolaan Resor Wisata Nusa Dua tidak hanya menggunakan standar internasional semata, tetapi juga memiliki standar *Tri Hita Karana* (konsep budaya Bali yang artinya tiga penyebab kesejahteraan yaitu harmonisnya hubungan manusia dengan Tuhan, dengan sesama manusia, dan dengan lingkungan).

C. Ideologi Pariwisata Budaya Berbasis Kearifan Lokal

Pengembangan Resor Wisata Nusa Dua tidak terlepas dari perpaduan internasional, nasional dan unsur budaya lokal walaupun adanya ideologi pariwisata global dan ideologi pariwisata hijau yang menekankan akan pentingnya pemeliharaan lingkungan, dalam ideologi budaya lokal terdapat konsep yang harus dipatuhi oleh pemilik modal yaitu *Tri Hita Karana*. *Tri Hita Karana* dalam budaya Bali terdiri atas tiga konsep, pertama keharmonisan

hubungan antara manusia dengan Tuhan, kedua manusia dengan alam sekitar dan ketiga manusia dengan sesamanya. Konsep *Tri Hita Karana* yang merupakan budaya lokal masyarakat Bali ini, sangat memengaruhi pengelolaan Resor Wisata Nusa Dua.

Pariwisata yang menggunakan kebudayaan sebagai potensi dasar, bagi pulau Bali pariwisata budaya merupakan pariwisata yang dapat membina dan melestarikan kebudayaan Bali tetapi juga dapat sebagai pengikisan budaya, yang dahulunya sakral sekarang menjadi profan. Terdapatnya pergeseran nilai budaya yang dapat diperjual belikan. Terkadang kebudayaan yang telah ada sejak lama di hargaikan dan disakralkan dijadikan objek pariwisata oleh investor yang bergerak di bidang pariwisata.

Tri Hita Karana diangkat sebagai landasan filosofi dalam pembangunan masyarakat Bali dalam peraturan daerah tentang RTRW, Perda No 4/1996., yang direvisi dan disempurnakan menjadi Perda Provinsi Bali No.16 Tahun 2009, tentang RTRW Provinsi Bali 2009-2029. Begitu juga untuk Perda Provinsi Bali No 3 Tahun 1991 tentang Pariwisata Budaya Bali kemudian direvisi dan disempurnakan dengan segala perubahan yang terjadi pada setiap perda menjadi Perda Provinsi Bali No 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisataan Budaya Bali saat ini. Konsep *Tri Hita Karana* menjadi konsep pembangunan di Bali, hal ini di cantumkan dalam peraturan tersebut yang pada bagian menimbang huruf a menyatakan:

“...bahwa kebudayaan Bali sebagai bagian dari kebudayaan Indonesia adalah landasan utama pembangunan kepariwisataan Bali, yang mampu menggerakkan potensi kepariwisataan dalam dinamika kehidupan sosial, nasional dan global.

Sedangkan beberapa ayat yang relevan dengan konsep *Tri Hita Karana* budaya Bali terdapat dalam bab 1 ketentuan umum pasal 1 ayat 13, 14 dan 15 yaitu:

Pasal 1 Ayat 13

Budaya Bali adalah kebudayaan masyarakat Bali yang dijiwai oleh nilai-nilai Agama Hindu.

Ayat 14

Kepariwisataan Budaya Bali adalah kepariwisataan Bali yang berlandaskan kepada Kebudayaan Bali yang dijiwai oleh ajaran Agama Hindu dan falsafah *Tri Hita Karana* sebagai potensi utama dengan menggunakan kepariwisataan sebagai wahana aktualisasinya, sehingga terwujud hubungan timbal-balik yang dinamis

antara kepariwisataan dan kebudayaan yang membuat keduanya berkembang secara sinergis, harmonis dan berkelanjutan untuk dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, kelestarian budaya dan lingkungan.

Ayat 15

Tri Hita Karana adalah falsafah hidup masyarakat Bali yang memuat tiga unsur yang membangun keseimbangan dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungannya yang menjadi sumber kesejahteraan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kehidupan manusia.

Perda ini mengisyaratkan *Tri Hita Karana* dijadikan landasan setiap pembangunan yang dilakukan di Bali dan akan membawa kesejahteraan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi semua kehidupan manusia dan makhluk lainnya dalam melestarikan lingkungan yang menyeluruh.

Sejalan dengan perjalanan waktu dengan masuknya pengaruh globalisasi secara tidak langsung sangat berpengaruh pada tatanan masyarakat dan adat Bali. Pengaruh ini akan berdampak kepada pengikisan nilai-nilai budaya Bali secara perlahan-lahan dalam masyarakat, baik di daerah pedesaan maupun di daerah perkotaan. Bagi golongan yang merasa akan rusaknya nilai budaya dan merasa empati, akan mempertahankan nilai budaya tersebut. Mereka akan mempertahankan sesuai dengan kepentingan yang akan mereka capai, terutama dalam hal ini nilai *Tri Hita Karana* (dalam konsep agama Hindu). Golongan yang mempunyai kepentingan melakukan cara seperti sekarang ini *Tri Hita Karana* harus menjadi pedoman dalam sebuah nama dari badan akreditasi lingkungan yang diberi nama *Tri Hita Karana Tourism Award and Accreditation*.

Konsep *Tri Hita Karana* telah lama diterapkan dalam pengelolaan Resor Wisata Nusa Dua oleh BTDC sebagai pengelola. BTDC sebagai pengelola bukan hanya menerapkan *Tri Hita Karana* kepada investor untuk melakukannya tetapi, sebagai pengelola Resor Wisata Nusa Dua yang beroperasi di Bali, BTDC juga ikut dalam *Tri Hita Karana Award* secara berkala. Penerapan *Tri Hita Karana* ini di Resor Wisata Nusa Dua dapat dilihat dari penerapan di sepanjang wilayah tersebut dengan adanya resor hijau yang luas di sekitar lingkungan kantor BTDC. Implementasi yang dilakukan ini dapat dilihat dari tiga konsep yaitu, aspek *parhyangan* (disediakan tempat ibadah seperti puja mandala),

aspek *pawongan* (lingkungan perkantoran yang terdiri atas sumber daya manusia yang berasal dari berbagai daerah) dan aspek *palemahan* (adanya lingkungan yang hijau).

Saat ini *Tri Hita Karana* bukan saja sebatas penerapan dalam pengelolaan Resor Wisata Nusa Dua, tetapi sekarang telah ada penghargaan *Tri Hita Karana Tourism Award and Accreditation* yang dimulai pada tahun 2000 oleh *Bali Travel News* dari Kelompok Media *BaliPost*. Saat pertama diadakannya *Tri Hita Karana Award* ini, didukung oleh beberapa komponen pemerintah seperti Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Disparda Provinsi Bali, Bapedalda, dan pusat kajian Bali. Dalam melakukan penilai *Tri Hita Karana* yang merupakan filosofi hidup masyarakat Bali terdiri atas tiga aspek yaitu nilai budaya dan spiritualitas (*parhyangan*), kemasyarakatan (*pawongan*), dan lingkungan (*palemahan*).

Sertifikat *Tri Hita Karana* di atas secara tidak langsung untuk menaikkan gengsi dari suatu perusahaan atau hotel yang ada di Resor Wisata Nusa Dua untuk berlomba-lomba mendapatkan sertifikat *Tri Hita Karana*. Diskursus ini berjalan karena adanya relasi kekuasaan antara pemerhati budaya dan pemerintah.

Dengan adanya *Tri Hita Karana Award* setiap industri pariwisata baik hotel sampai pengelola di Resor Wisata Nusa Dua juga berlomba-lomba untuk mendapatkan sertifikat *Tri Hita Karana* agar bisa menjadi dan menyaingi hotel Melia, hotel yang pertama mendapatkan *Tri Hita Karana Award*. Hotel yang pertama mendapatkan sertifikat *Tri Hita Karana* di Resor Wisata Nusa Dua yaitu Melia Hotel yang telah lama mengimplikasikan konsep *Tri Hita Karana* sebelum populernya wacana *Tri Hita Karana* ini. Pada saat ini Hotel Westin telah ikut melakukan konsep *Tri Hita Karana* tetapi belum mendapatkan sertifikat *Tri Hita Karana Award*. Bagi hotel-hotel, termasuk yang ada di Resor Wisata Nusa Dua, sertifikat *Tri Hita Karana* tidak saja merupakan bukti bahwa mereka melakukan pengelolaan usaha sesuai dengan nilai-nilai filosofi *Tri Hita Karana* tetapi juga bisa digunakan untuk menunjukkan reputasi dan bahkan melakukan pencitraan dan promosi dalam penjualan (*sales and marketing*). Selaku penerima THK Award, hotel-hotel diperkenankan untuk menggunakan logo award tersebut. Memang, banyak hotel menggunakan logo itu sebagai signature untuk email mereka dan juga dalam logo di kertas perusahaan dan di media promosi di internet. Semangat dan komitmen hotel-hotel di Nusa Dua untuk mengikuti berbagai sistem akreditasi jika digabungkan merupakan tanda bahwa mereka memperhatikan nilai-nilai *green tourism* dalam pengelolaan usaha. Hal ini memperkuat dari

komitmen BTDC selaku salah satu pilar utama dalam pengelolaan Resor Wisata Nusa Dua.

V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Tiga ideologi dominan yang mewarnai pengelolaan Resor Wisata Nusa Dua yaitu ideologi pariwisata global, ideologi pariwisata hijau, dan ideologi pariwisata budaya berbasis kearifan lokal Tri Hita Karana. Ketiga ideologi ini memengaruhi relasi kuasa di antara ketiga pilar dalam pengelolaan Resor Wisata Nusa Dua. Mereka sama-sama menunjukkan kesepahaman dalam mendukung ketiga ideologi itu walaupun peran yang mereka tunjukkan berbeda-beda. Dalam hal keamanan, misalnya, masyarakat pun mendukung dan patuh pada pelaksanaan standar keamanan internasional di resor wisata Nusa Dua, begitu juga halnya ideologi pariwisata hijau dan ideologi budaya lokal. Walaupun ideologi pariwisata budaya global dan *green tourism* bersifat global atau universal, pengelola Resor Wisata Nusa Dua mampu menampilkan keindahan dan kehijauan resor yang khas Bali, yang mencerminkan pesona dengan lanskap alam dan budaya Bali. Pintu gerbang khas Bali, dekorasi taman, arsitektur bangunan hotel dan interiornya serta lanskap alam nyiur melambai secara kompak menegaskan suasana resor wisata khas Bali yang tiada duanya di dunia, namun dalam manajemen dan pelayanan mereka menunjukkan kualitas pelayanan kelas dunia sesuai dengan standar *chain hotels* yang memegang manajemennya.

B. Saran

Derasnya perkembangan pariwisata sehingga menyebabkan tingginya minat investor untuk melakukan investasi di Bali khususnya Nusa Dua, maka disarankan kepada BTDC sebagai pengelola agar memerhatikan lingkungan yang dijadikan pengembangan. Wacana pariwisata hijau agar dijalankan dengan komitmen yang luas, artinya tidak saja bersifat dari oleh dan untuk BTDC dan resor. Kawasan di luar wilayah BTDC juga perlu ditata secara bersama dengan masyarakat sehingga keindahan Nusa Dua bersifat menyeluruh karena hal itu akan memperkuat citra kelas mewah Resor Wisata Nusa Dua.

DAFTAR PUSTAKA

- Agger, Ben. 2006. *Teori Sosial Kritis: Kritik, Penerapan dan Implikasinya*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Althusser, Louis. 2010. *Tentang Ideologi: Marxisme Strukturalis, Psikonalisis, Cultural Studies*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Brtens, K. 2014. *Sejarah Filsafat Kontemporer Perancis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- BTDC. 2010. Laporan Tahunan 2010
- Dwyer, Larry. 2005. "Trends underpinning global tourism in the coming decade", dalam William F. Theobald (ed.) *Global Tourism*, pp. 529-545. Amsterdam: Elsevier.
- Foucault, Michel. 2009. *Pengetahuan dan Metode: Karya-karya penting Foucault*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Habermas, Jürgen. 1984. *Reason and The Rationalization of Society*, Volume 1 of *The Theory of Communicative Action*, English translation by Thomas McCarthy. Boston: beacon Press (Edisi aslinya terbit di Jerman 1981).
- _____. 1996. *Between Facts and Norm: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Lewis, Jeff. 2008. *Cultural Studies: The Basic*. London: Sage.
- Macey, David. 2001. *The Penguin Dictionary of Critical Theory*. England: Penguin Books Ltd.
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009, Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009 – 2029.
- Perda Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Budaya Bali
- Sugiyono, Bambang. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata Indonesia.



